



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3511486  
FAKSIMILE (021) 3511486; LAMAN [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : UND-75/PK.4/2023 14 April 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas  
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Online Tahap 2 Tahun 2023  
Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Penatausahaan dan  
Pengelolaan Aset Daerah, dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Yth. 1. Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
2. Kepala Badan/Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) bekerja sama dengan LPEM FEB Universitas Indonesia, LPER FEB Universitas Andalas, PK2ND FEB Universitas Brawijaya, PPKED FEB Universitas Hasanuddin, dan P3KD FEB Universitas Sam Ratulangi, akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah *online* Tahap 2 TA 2023 dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kelas	Tanggal Pelaksanaan	Jam Pelatihan	Peserta
1.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	22 s.d. 26 Mei 2023	26 Jam	30 orang
		5 s.d. 9 Juni 2023	26 Jam	30 orang x 2 kelas
2.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	5 s.d. 9 Juni 2023	26 Jam	30 orang x 2 kelas
3.	Pembiayaan Pembangunan Daerah	19 s.d. 23 Juni 2023	26 Jam	30 orang

Bimtek tersebut akan dilaksanakan secara daring (*online*) menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting* selama 5 (lima) hari. Peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pelatihan elektronik (*e-sertifikat*).

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara/i kiranya dapat menugaskan pejabat/pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek dimaksud. Untuk mendukung pencapaian pembelajaran yang optimal, peserta mohon dapat dibebaskan dari tugas rutin kantor selama pelaksanaan kegiatan bimtek. Adapun persyaratan peserta dan informasi lainnya tercantum dalam lampiran undangan ini.

Mengingat kuota yang terbatas, diharapkan calon peserta segera melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan <http://bit.ly/Bimtek2023-Keuangan2>. Untuk pertanyaan lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi narahubung yang tertera dalam lampiran undangan ini.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tandatangan elektronik (*digitalsign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, *Hotline Dering* DJPK: 150420.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Kapasitas dan  
Pelaksanaan Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



## Ketentuan Umum

### Bimbingan Teknis Keuangan Daerah *Online* Tahap 2 Tahun 2023

#### I. Jadwal Pelaksanaan Bimtek

No.	Kelas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Batas Waktu Pendaftaran
1.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	22 s.d. 26 Mei 2023	30 orang	5 Mei 2023
		5 s.d. 9 Juni 2023	30 orang x 2 kelas	
2.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	5 s.d. 9 Juni 2023	30 orang x 2 kelas	5 Mei 2023
3.	Pembiayaan Pembangunan Daerah	19 s.d. 23 Juni 2023	30 orang	5 Mei 2023

Jangka waktu pelaksanaan bimtek *online* selama 5 hari kerja dengan total jam pelatihan sebanyak 26 jam. Setiap hari terdiri dari 2 sesi (durasi 1 sesi yaitu 2 - 3 jam pelatihan).

#### II. Persyaratan Peserta

1. Calon peserta yang diutamakan mendaftar adalah pejabat/pegawai pemda yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan BMD, perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah
2. Calon peserta berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian bimtek *online* sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Calon peserta dibebaskan dari tugas rutin kantor selama pelaksanaan kegiatan bimtek.
4. Berusia maksimum 50 tahun dan mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing.
5. Belum pernah mengikuti Bimtek Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah, dan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh DJPK dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Calon peserta adalah **ASN yang berstatus PNS** dan memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat dengan pangkat minimal Pengatur Muda/ golongan II/a.
7. Memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan berupa laptop/komputer, koneksi internet, dan dapat menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting*.

#### III. Ketentuan Pendaftaran

1. Setiap Pemda dapat mengirimkan peserta sebanyak 1 (satu) orang pada tiap kelas.
2. Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan <http://bit.ly/Bimtek2023-Keuangan2> dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satu email hanya dapat digunakan untuk mendaftarkan satu orang.
  - b. Pendaftar juga diharuskan mengunggah/melampirkan foto atau scan formulir persetujuan atasan pada halaman pendaftaran daring.
3. Pendaftaran akan ditutup oleh panitia apabila kuota peserta setiap kelas sudah terpenuhi.
4. Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti bimtek adalah peserta yang telah lolos proses verifikasi oleh panitia dan ditetapkan dalam daftar peserta definitif oleh Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
5. Peserta yang dinyatakan sebagai peserta definitif akan dihubungi kembali oleh panitia paling lambat Tanggal 12 Mei 2023.
6. Peserta yang dinyatakan sebagai peserta definitif akan dimasukkan ke dalam *Whatsapp Group* bimtek masing-masing kelas.

7. Untuk kepentingan administrasi dan pemberian sertifikat pelatihan, seluruh peserta wajib menyampaikan Surat Tugas mengikuti pelatihan dari instansi masing-masing kepada panitia sebelum pelatihan dimulai.
8. Sertifikat diberikan kepada peserta yang **menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan**, antara lain: mengikuti kelas secara daring **minimal 90%**, mengerjakan pre test dan post test, mengisi form evaluasi setiap hari, serta dinyatakan lulus dengan kriteria hasil post test **minimal mencapai nilai 70**.
9. Peserta akan mendapat biaya bantuan komunikasi berupa pulsa prabayar.
10. Semua biaya pelaksanaan Bimtek dibebankan pada DIPA DJPK Kemenkeu TA 2023.
11. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami:
  - a. Sdri. Lena (08161873741)
  - b. Sdri. Anissa (085263633625)

#### IV. Ketentuan Tambahan

Bagi peserta yang sudah dinyatakan sebagai peserta definitif namun mengundurkan diri maka akan diberikan surat teguran tertulis kepada pimpinan pemda agar menjadi perhatian dan komitmen pada penyelenggaraan bimtek mendatang.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala



**KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH  
 KELAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH**

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	Bimtek keuda kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis dan keterampilan dasar dalam bidang perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan kaidah umum dan praktik penganggaran yang berlaku.
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah. Arah pembangunan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas harus menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara integratif dan tidak semata difokuskan kepada pemenuhan standar pelayanan publik di daerah atau peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, tapi juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
	Untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas ASN Pemda di bidang perencanaan dan penganggaran, DJPK bekerja sama dengan <i>Center of Excellence</i> menyelenggarakan bimtek keuangan daerah jalur daring kelas perencanaan dan penganggaran daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai perencana pembangunan daerah maupun penyusun anggaran dengan baik sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel.
	<b>SASARAN (TARGET LEARNERS)</b>
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam perencanaan dan/atau penganggaran serta OPD lainnya yang terkait.	
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input type="checkbox"/> NON TATAP MUKA <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>e-learning</i></li> <li><input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat kerja</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan jarak jauh</li> <li><input type="checkbox"/> Magang</li> </ul>
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas perencanaan penganggaran daerah, peserta diharapkan mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Memahami Penganggaran Daerah</li> <li>3. Memahami <i>Overview</i> APBD</li> <li>4. Memahami Praktik Penyusunan Anggaran</li> <li>5. Mengetahui <i>E-Government</i></li> </ol>	

## KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 1.1. Memahami Pengertian dan Konsep Pembangunan Daerah
  - 1.2. Memahami Pengertian dan Konsep Perencanaan Pembangunan
  - 1.3. Memahami Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional (sinkronisasi dokumen RTRW, KLHS, dan SPM)
  - 1.4. Memahami Sistem perencanaan / RPJMD (program prioritas daerah, RKPD)
  - 1.5. Memahami Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (pohon kinerja)
  - 1.6. Memahami Penyusunan Renstra, Renja OPD
  - 1.7. Memahami KUA dan PPAS
  
2. Memahami Penganggaran Daerah
  - 2.1. Memahami Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Serta Siklus Anggaran
  - 2.2. Memahami Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF)
  - 2.3. Memahami *Value for Money*, Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal
  - 2.4. Memahami Standar Satuan Harga
  - 2.5. Memahami Analisis Standar Belanja
  - 2.6. Melakukan Simulasi Penyusunan Analisis Standar Belanja
  
3. Memahami Overview APBD
  - 3.1. Memahami Definisi/Pengertian APBD
  - 3.2. Memahami Struktur APBD (Permendagri terkait penyusunan APBD tahun berjalan, Kepmendagri 050\_5889/2021)
  - 3.3. Memahami Gambaran Umum Pendapatan Daerah
  - 3.4. Memahami Gambaran Umum Belanja
  - 3.5. Memahami Gambaran Umum Pembiayaan Daerah
  
4. Menerapkan Praktik Penyusunan Anggaran
  - 4.1. Melakukan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Teori dan Latihan) (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, dana bergulir)
  - 4.2. Melakukan Penyusunan Angka Dasar/ Based line dan inisiatif baru dalam KPJMD
  
5. Menerapkan *E-Government*
  - 5.1. Memahami Pengertian dan Ruang Lingkup *E-Government*
  - 5.2. Memahami *E-Planning*, *E-Budgeting*, dan *E-Controlling*
  - 5.3. Melakukan Praktik *E-Government: E-Planning, E-Budgeting, dan E-Controlling*

### LAMA BIMTEK DAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1.	Materi pokok	1. Perencanaan Pembangunan Daerah	6	1
		2. Penganggaran Daerah	8	2
		3. <i>Overview</i> APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	3	3
		4. Praktik Penyusunan Anggaran	4	4
		5. <i>E-Government</i>	3	5
2.	Materi penunjang	-		
3.	Ceramah	<i>Current issue</i> Standar Harga Satuan Regional	2	6
4.	PKL/ studi lapangan	-		
5.	Outbound	-		
6.	MFD	-		

7.	Pengarahan program	-		
8.	<i>Action Learning</i>	-		
TOTAL JP			26	
LAMA WAKTU UJIAN		Pre test: 30 menit Post test: 30 menit	60 menit	
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari	
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>				
Bimtek kelas perencanaan dan penganggaran daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
<b>PERSYARATAN PESERTA</b>				
<b>Administrasi</b>				
1. ASN di lingkungan unit pengelola keuangan daerah dan unit perencanaan daerah dan OPD lainnya yang terkait				
2. Usia maksimum 50 tahun				
3. Belum pernah mengikuti bimtek kelas perencanaan dan penganggaran daerah dalam dua tahun terakhir				
4. Mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing				
<b>Kompetensi</b>				
1. Pendidikan minimum D-III				
2. Pangkat minimal pengatur II/c				
<b>KUALIFIKASI PENGAJAR</b>				
<b>1. Kualifikasi Umum</b>				
a. Profesional/praktisi di bidangnya				
b. Memiliki pengalaman mengajar				
c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal				
<b>2. Kualifikasi Khusus</b>				
a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan				
b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i>				
<b>3. Lain-lain:</b>				
Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)				
<b>REKOMENDASI PENGAJAR</b>				
No.	Materi		Rekomendasi Pengajar	
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah		Akademisi	
2.	Penganggaran Daerah		Akademisi	
3.	<i>Overview</i> APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan		Akademisi	
4.	Praktik Penyusunan Anggaran		Akademisi/praktisi	
5.	<i>E-Government</i>		Kementerian Dalam Negeri/praktisi pmda	
6.	<i>Current issue</i> perencanaan dan penganggaran daerah		Kemenkeu/akademisi	
<b>BENTUK EVALUASI</b>				
Evaluasi Level 1 Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website <i>e-learning</i> DJPK.				
Evaluasi Level 2 Evaluasi pemahaman peserta dengan instrumen ujian sebelum dan sesudah pelaksanaan bimtek melalui website <i>e-learning</i> DJPK				
Evaluasi Level 3				

Evaluasi Level 4

**FASILITAS**

1. Ruang pembelajaran daring melalui *zoom meeting*
2. Souvenir bimtek berupa penggantian biaya komunikasi, sepanjang belum diberikan dari instansi masing-masing
3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
4. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
5. Fasilitator/administrator kegiatan
6. E-Sertifikat bagi peserta yang memenuhi ketentuan bimtek dan dinyatakan lulus.



**KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH**  
**KELAS PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH**

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	Bimtek keuda kelas pengelolaan barang milik daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, sikap, dan keterampilan teknis penatausahaan dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan kaidah umum dan praktik pengelolaan aset daerah yang berlaku.
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.  Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan aset daerah memiliki peranan yang penting sebagai upaya untuk menggerakkan orang dan mengoptimalkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama guna mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  Memperhatikan kondisi penatausahaan dan pengelolaan aset daerah yang sangat dinamis dan kompleks, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah sehingga pemerintah daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan secara efektif, objektif, dan terukur sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
	<b>SASARAN (TARGET LEARNERS)</b>
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan dan aset daerah, terutama di bidang penatausahaan dan pengelolaan aset daerah.	
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
	<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> <b>NON TATAP MUKA (NTM)</b> <input type="checkbox"/> <i>e-learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat kerja <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pelatihan jarak jauh</b> <input type="checkbox"/> Magang <input type="checkbox"/> Pertukaran ASN dengan pegawai swasta
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah, peserta diharapkan mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memahami Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>7. Memahami Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran</li> <li>8. Memahami Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> <li>9. Memahami Pengamanan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)</li> <li>10. Memahami Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah</li> <li>11. Memahami Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah</li> </ol>	

## KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 1.1 memahami regulasi barang milik daerah
  - 1.2 memahami siklus pengelolaan barang milik daerah (menjelaskan secara umum perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah)
  - 1.3 memahami pejabat pengelolaan barang milik daerah
2. Memahami Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran
  - 2.1. memahami ketentuan umum perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan penganggaran
  - 2.2. memahami perencanaan pengadaan barang milik daerah
  - 2.3. memahami perencanaan pemeliharaan barang milik daerah
3. Memahami Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik daerah
  - 3.1. memahami prinsip umum penggunaan barang milik daerah
  - 3.2. memahami prosedur penggunaan barang milik daerah
  - 3.3. memahami prinsip umum pemanfaatan barang milik daerah
  - 3.4. memahami bentuk-bentuk dan prosedur pemanfaatan barang milik daerah
4. Memahami Pengamanan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
  - 4.1. memahami prinsip umum pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
  - 4.2. memahami tata cara pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
  - 4.3. memahami tuntutan ganti kerugian (TGR)
5. Memahami Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah
  - 5.1. memahami prinsip umum dan tata cara pemindahtanganan barang milik daerah
  - 5.2. memahami prinsip umum dan tata cara pemusnahan barang milik daerah
  - 5.3. memahami prinsip umum dan tata cara penghapusan barang milik daerah
6. Memahami Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
  - 6.1. memahami ruang lingkup penatausahaan barang milik daerah
  - 6.2. memahami akuntansi barang milik daerah
  - 6.3. memahami prinsip umum dan tata cara pembukuan barang milik daerah
  - 6.4. memahami prinsip umum dan tata cara inventarisasi barang milik daerah
  - 6.5. memahami prinsip umum dan tata cara pelaporan barang milik daerah
  - 6.6. memahami penggunaan aplikasi untuk penatausahaan barang milik daerah

### LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1.	Materi pokok	1. Manajemen Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	1
		2. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran	3	2
		3. Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5	3
		4. Pengamanan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)	3	5
		5. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	4
		6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	7	6
2.	Materi penunjang	-	-	-
3.	Ceramah	-	-	-

4.	PKL/ studi lapangan	-	-	-
5.	Observasi	-	-	-
6.	Pengarahannya program	-	-	-
7.	<i>Action Learning</i>	-	-	-
TOTAL JP			26 JP	
LAMA WAKTU UJIAN <i>Pre Test</i> : 30 Menit <i>Post Test</i> : 30 Menit			60 Menit	
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari	
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>				
Bimtek kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
<b>PERSYARATAN PESERTA</b>				
<b>Administrasi</b>				
5. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan dan aset daerah				
6. Usia maksimum 55 tahun				
7. Belum pernah mengikuti bimtek kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah dalam dua tahun terakhir atau pernah mengikuti e-learning penatausahaan dan pengelolaan aset daerah				
8. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing				
<b>Kompetensi</b>				
3. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi <i>zoom cloud meeting</i>				
4. Peserta memakai laptop yang terkoneksi dengan internet				
<b>KUALIFIKASI PENGAJAR</b>				
<b>4. Kualifikasi Umum</b>				
d. Profesional/praktisi di bidangnya				
e. Memiliki pengalaman mengajar				
f. Mendapatkan penugasan dari instansi asal				
<b>5. Kualifikasi Khusus</b>				
c. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan				
d. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i>				
<b>REKOMENDASI PENGAJAR</b>				
No.	Materi		Rekomendasi Pengajar	
1	Manajemen Aset dan Sistem pengelolaan Barang Milik Daerah		Akademisi	
2	Organisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		Akademisi	
3	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Akademisi	
4	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Akademisi	
5	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah		Akademisi	
6	<i>Current issue</i>		Praktisi/Pemda percontohan	

Catatan:

Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.

### **BENTUK EVALUASI**

Evaluasi Level 1

Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website *e-learning* DJPK.

Evaluasi Level 2

Evaluasi pemahaman peserta dengan instrumen ujian sebelum dan sesudah pelaksanaan bimtek melalui website *e-learning* DJPK

Evaluasi Level 3

-

Evaluasi Level 4

-

### **FASILITAS**

7. Ruang pembelajaran daring melalui *zoom meeting*
8. Souvenir bimtek berupa penggantian biaya komunikasi, sepanjang belum diberikan dari instansi masing-masing
9. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
10. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
11. Fasilitator/administrator kegiatan
12. E-Sertifikat bagi peserta yang memenuhi ketentuan bimtek dan dinyatakan lulus.

## KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Pembiayaan Pembangunan Daerah</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	Bimtek keuangan daerah kelas Pembiayaan Pembangunan Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, dan keterampilan dasar dalam bidang pembiayaan pembangunan daerah yang antara lain terdiri dari pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah.
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	Pembiayaan Utang Daerah yang merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan daerah, merupakan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah guna akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, melalui penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Mencermati perkembangan <i>creative financing</i> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu adanya pemahaman dan peningkatan kapasitas ASN Pemda melalui kegiatan bimbingan teknis keuangan daerah yang diselenggarakan secara daring kelas Pembiayaan pembangunan daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai perencana pembangunan maupun penyusun anggaran daerah dengan baik sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel melalui pembiayaan daerah.
	<b>SASARAN (TARGET LEARNERS)</b>
	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan bidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>TATAP MUKA (TM)</b></li> <li>□ NON TATAP MUKA (NTM) <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>e-learning</i></li> <li>□ Bimbingan di tempat kerja</li> <li>✓ <b>Pelatihan jarak jauh</b></li> <li>□ Magang</li> <li>□ Pertukaran ASN dengan pegawai swasta</li> </ul> </li> </ul>
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
<p>Setelah mengikuti bimtek keuda kelas pembiayaan pembangunan daerah, peserta diharapkan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD</li> <li>2. Memahami Pinjaman Daerah</li> <li>3. Memahami Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya</li> <li>4. Memahami Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah</li> <li>5. Memahami Manajemen Pengelolaan Utang</li> </ol>	

## KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD
  - 1.1. Memahami kebijakan fiskal, *counter cyclical*, dan kesinambungan fiskal
  - 1.2. Memahami struktur APBD dan anggaran surplus/defisit
  - 1.3. Memahami kebutuhan pembiayaan: layanan publik dan pembangunan infrastruktur
  - 1.4. Memahami sumber-sumber pembiayaan
  - 1.5. Memahami sinergi pendanaan
  - 1.6. Memahami kebijakan perencanaan pembiayaan daerah
2. Memahami Pinjaman Daerah
  - 2.1. Memahami prinsip umum dan jenis pinjaman daerah
  - 2.2. Memahami batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah
  - 2.3. Memahami persyaratan umum pinjaman daerah
  - 2.4. Memahami prosedur pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan selain pemerintah
  - 2.5. Memahami konsep perhitungan: analisis kemampuan meminjam (DSCR, batas maksimum pinjaman dan pinjaman yang diperbolehkan)
3. Memahami Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya
  - 3.1. Memahami pengertian obligasi dan sukuk daerah
  - 3.2. Memahami tipe sekuritas yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah
  - 3.3. Memahami landasan teori obligasi dan obligasi daerah
    - a. Prinsip dasar obligasi (*Bonds*)
    - b. Pokok-pokok yang harus dipahami dalam *Bonds*
    - c. Penilaian Obligasi
    - d. Karakteristik utama obligasi daerah
    - e. Perencanaan *Supply* dan *Demand*
  - 3.4. Memahami prosedur penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah
  - 3.5. Memahami pembayaran kembali obligasi daerah dan sukuk daerah
  - 3.6. Memahami konsep perhitungan: analisis penilaian obligasi daerah dan sukuk daerah (penentuan harga, tingkat resiko dan tingkat keuntungan)
4. Memahami Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah
  - 4.1. Memahami maksud dan tujuan investasi pemerintah
  - 4.2. Memahami analisis kelayakan proyek
  - 4.3. Memahami sumber pendanaan yang tepat
  - 4.4. Memahami *best practice* proyek yang dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
5. Memahami Manajemen Pengelolaan Utang
  - 5.1. Memahami penguatan kelembagaan
  - 5.2. Memahami manajemen resiko
  - 5.3. Memahami metode dan tata cara monitoring dan evaluasi pengelolaan utang
  - 5.4. Memahami inovasi-inovasi pembiayaan (*Land Value Captured, Corporate Social Responsibility*)

## LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1	Materi pokok	7. Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD	2	1
		8. Pinjaman Daerah	5	2
		9. Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya	7	3
		10. Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah	6	4
		11. Manajemen Pengelolaan Utang	4	5

2	Materi penunjang	-	-	-
3	Ceramah	<i>Current issue / knowledge sharing</i>	2	
4	PKL/ studi lapangan	-	-	-
5	Observasi	-	-	-
6	Pengarahannya program	-	-	-
7	<i>Action Learning</i>	-	-	-
TOTAL JP			26 JP	
LAMA WAKTU UJIAN <i>Pre Test</i> : 30 Menit <i>Post Test</i> : 30 Menit			60 Menit	
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari	
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>				
Bimtek kelas Pembiayaan Pembangunan Daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar				
<b>PERSYARATAN PESERTA</b>				
<b>Administrasi</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASN Pemda yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan bidang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>2. Usia maksimum 50 tahun</li> <li>3. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing</li> </ol>				
<b>Kompetensi</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi <i>zoom meeting</i></li> <li>2. Peserta memakai laptop yang terkoneksi dengan internet dengan baik</li> </ol>				
<b>KUALIFIKASI PENGAJAR</b>				
<b>6. Kualifikasi Umum</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profesional/praktisi di bidangnya</li> <li>b. Memiliki pengalaman mengajar</li> <li>c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal</li> </ol>				
<b>7. Kualifikasi Khusus</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan</li> <li>b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i></li> </ol>				
<b>8. Lain-lain:</b>				
Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)				
<b>REKOMENDASI PENGAJAR</b>				
No.	Materi		Rekomendasi Pengajar	
1	Kebijakan Fiskal dan Struktur APBD		Akademisi	
2	Pinjaman Daerah		Akademisi/Praktisi	
3	Obligasi dan Sukuk Daerah Serta Instrumen Keuangan Lainnya		Akademisi/Praktisi	
4	Kebijakan Investasi dan Analisis Proyek Pemerintah Daerah		Akademisi/Praktisi	
5	Manajemen Pengelolaan Utang		Akademisi/Praktisi	
6	<i>Current issue</i>		Praktisi/(K/L)	

Catatan:

Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.

### BENTUK EVALUASI

Evaluasi Level 1

Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK.

Evaluasi Level 2

Peserta menjalani *pre test* dan *post test* untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek

Evaluasi Level 3

-

Evaluasi Level 4

-

### FASILITAS

1. Ruang pembelajaran daring melalui *zoom meeting*
2. Souvenir bimtek berupa penggantian biaya komunikasi, sepanjang belum diberikan dari instansi masing-masing
3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
4. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
5. Fasilitator/administrator kegiatan
6. E-sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan semua kelengkapan kegiatan bimtek

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala





### Formulir Persetujuan Atasan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nomor Whatsapp : .....

Menyatakan setuju dan berkomitmen mendukung keikutsertaan pejabat/pegawai di bawah ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Keuangan Daerah secara Daring (*Online*)

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Status : PNS/CPNS \*Coret yang tidak perlu  
Instansi : .....  
Kab/Kota : .....  
Nomor Whatsapp : .....  
Kelas Bimtek : .....  
Tanggal Bimtek : .....

....., 2023  
Pejabat yang menugaskan,

.....  
.....

#### Catatan:

1. Pendaftaran peserta dilakukan melalui tautan <http://bit.ly/Bimtek2023-Keuangan2>.
2. Batas waktu pendaftaran peserta paling lambat tanggal 5 Mei 2023.
3. Peserta tidak dikenakan biaya.
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami:
  - a. Sdri. Lena (08161873741)
  - b. Sdri. Anissa (085263633625)

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

